

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kerja sama antara Vietnam dan International Partner Group (IPG) melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai upaya strategis dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JETP berperan sebagai instrumen kerja sama internasional yang tidak hanya menyediakan dukungan pendanaan, tetapi juga mendorong transformasi struktural di sektor energi Vietnam. Melalui kerangka ini, transisi energi ditempatkan sebagai agenda pembangunan jangka panjang yang mengaitkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan tata kelola kebijakan nasional.

Dinamika kerja sama Vietnam dan IPG menunjukkan bahwa transisi energi tidak semata-mata merupakan proses teknis penggantian sumber energi, melainkan juga proses politik dan institusional yang kompleks. Dalam implementasi JETP, Vietnam dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan komitmen internasional yang telah disepakati, termasuk target pengurangan pembangkit listrik berbasis batu bara dan peningkatan kapasitas energi terbarukan. Penyesuaian tersebut mencerminkan praktik koordinasi kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam kerja sama multilateral di mana negara tetap bertindak sebagai aktor rasional yang tetap mengejar kepentingan nasional, namun bersedia menyesuaikan kebijakan demi memperoleh manfaat kolektif dalam kerangka institusional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi JETP di Vietnam masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Keterbatasan infrastruktur jaringan listrik, ketergantungan ekonomi terhadap sektor energi fosil, serta koordinasi antarlembaga pemerintah yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan transisi energi. Selain itu, kesiapan regulasi dan kapasitas institusional domestik Vietnam masih memerlukan penguatan agar

dapat mengelola pendanaan, teknologi, dan program transisi energi secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, salah satu bentuk kerja sama yang paling menarik dalam kerja sama Vietnam dan IPG adalah pembentukan secara sesama *Resource Mobilisation Plan* yang tertuang dalam *Political Declaration* dan *Joint Statement* pada pembentukan JETP di Vietnam. Secara keseluruhan RMP merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan koordinasi yang dibentuk bersama oleh Vietnam dan IPG yang berisikan kerangka perencanaan yang memuat identifikasi investasi prioritas, reformasi kebijakan dan regulasi, serta proyek-proyek utama yang mendukung pencapaian target transisi energi dan penurunan emisi Vietnam.

Adapun, sepanjang tahun 2025 koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan cukup intens dalam membahas implementasi proyek yang tertuang dalam RMP terutama dalam mengembangkan energi terbarukan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertemuan yang membahas berbagai proyek yang sudah dirancang bersama antara Vietnam dan IPG hingga tercapainya kesepakatan 3 proyek pertama yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam melalui perantara *State Owned Enterprise* dan *International Partner* dari beberapa negara dan DFI.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama internasional multilateral merupakan elemen kunci dalam mendukung transisi energi di negara berkembang. Dalam konteks Vietnam, JETP tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendanaan, tetapi juga sebagai platform koordinasi kebijakan, transfer pengetahuan, dan pembentukan komitmen kolektif untuk mencapai tujuan iklim global. Hal ini menunjukkan bahwa transisi energi dan pencapaian NZE membutuhkan sinergi antara kebijakan domestik dan dukungan internasional yang berkelanjutan.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Vietnam memperkuat konsistensi dan kepastian kebijakan transisi energi,

khususnya dalam pengurangan ketergantungan pada batu bara dan pengembangan energi terbarukan. Kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan mitra internasional dan investor yang terlibat dalam skema JETP

Selain itu, Vietnam perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung energi terbarukan, khususnya jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi, agar kapasitas energi bersih yang terus meningkat dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengalami pembatasan. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat nasional dan lokal juga perlu menjadi prioritas, termasuk melalui program pelatihan dan kerja sama teknis dengan negara-negara IPG.

Terlebih lagi, tingginya komitmen dan ketertarikan Vietnam terhadap skema JETP dapat dijadikan landasan awal untuk memperkuat dan memperdalam kerja sama ini. Hal tersebut menjadi penting mengingat progres transisi energi Vietnam hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya memenuhi target dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi JETP perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian target teknis, tetapi juga pada penguatan tata kelola, koordinasi antaraktor, serta keberlanjutan komitmen politik dalam jangka panjang.

6.2.2. Saran Akademis

Dari sisi akademis, penelitian ini menyarankan pengembangan kajian kerja sama internasional dan diplomasi iklim dengan mengintegrasikan pendekatan kerja sama multilateral, transisi energi, dan ekonomi politik internasional secara lebih komprehensif. Studi mengenai JETP menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak lagi bersifat sektoral atau teknis semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang menghubungkan isu lingkungan, pembangunan, dan keadilan sosial.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengkaji efektivitas JETP dalam jangka panjang, khususnya dalam menilai sejauh mana komitmen internasional mampu mendorong perubahan struktural di sektor energi negara berkembang. Selain itu, pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan

hubungan internasional, kebijakan publik, dan studi energi akan sangat relevan untuk memahami kompleksitas transisi energi di tengah dinamika politik dan ekonomi global.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan pendekatan komparatif antarnegara penerima JETP. Kajian lanjutan juga dapat menyoroti peran aktor non-negara, dinamika politik domestik, serta implikasi sosial-ekonomi dari transisi energi dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur hubungan internasional sekaligus memberikan kontribusi kebijakan yang lebih aplikatif bagi negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.